

**Kebijakan, Konflik, dan  
Perjuangan Agraria Indonesia  
Awal Abad 21**

(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)

**Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21  
(Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)**

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Cetakan pertama, 2012

**Penulis** : Tim Peneliti STPN

**Penyunting** : Ahmad Nashih Luthfi

**Desain cover** : Dani RGB

**Layout** : Eko RGB

ISBN: 978-602-7894-03-7

**Penerbit:**

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Gedung Pengajaran Lantai II,  
Jalan Tata Bumi nomor 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293  
Telp: 0274-587239, e-mail: [pppm\\_stpn@yahoo.com](mailto:pppm_stpn@yahoo.com)

website: <http://pppm.stpn.ac.id/>

# PERJUANGAN UNTUK MENJADI BAGIAN DARI PROSES PERUBAHAN AGRARIA YANG MENGUNTUNGKAN (Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kabupaten Sarolangun, Jambi)

*Sutaryono, Amien Tohari, Anik Ifitah, Ahmad Nashih Luthfi*

## *Abstrak*

*Frekuensi dan eskalasi konflik yang mencuat bersamaan dengan ekspansi tanaman sawit telah menjadi perhatian banyak pihak sekarang ini. Sebagian besar penjelasan atas konflik itu berpandangan bahwa konflik tersebut adalah bukti ketersingkirannya petani dihadapan modal dan kekuasaan. Dengan menggunakan pendekatan diagnostic events, studi ini mengungkapkan bahwa konflik itu bukan saja ekspresi dari rasa ketersingkirannya atau penolakan terhadap tanaman sawit tetapi juga bentuk dari the struggle for better incorporation, sebuah upaya petani untuk dapat masuk dan terlibat di dalam sirkuit komoditas sawit yang menguntungkan. Apa yang sesungguhnya hendak ditolak adalah cara-cara yang ditempuh negara dalam memperluas tanaman ini yang bias kapitalis dan diperumit dengan lemahnya negara menjamin kepastian tenurial. Tuntutan masyarakat atas pengelolaan yang baik dan saling menguntungkan akan dinilai mampu menempatkan petani dan perusahaan di dalam skema pembangunan agraria yang tidak eksploitatif.*

**Kata Kunci:** *konflik, sawit, better incorporation, diagnostic events.*

## **Pendahuluan**

Pada 20 Mei 2012, sekitar pukul 11.00 WIB, sekitar 50 kelompok orang yang mengatasnamakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan berkendara sepeda motor secara berboncengan melakukan pembakaran di camp karyawan dan 15 hektar areal lahan perusahaan perkebunan P.T. Jambi Agro Wijaya (JAW) bagian dari *Bakrie Sumatra Plantations* yang ada di Simpang Meranti, Desa Mentawak Ulu, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Jambi. Upaya pencegahan langsung oleh keamanan perusahaan di lokasi kejadian sama sekali tidak berarti. Dalam

keterangan pihak perusahaan, enam puluh unit rumah dari 64 (enam puluh empat) rumah karyawan yang berdiri di lokasi, 15 (lima belas) hektar areal tanaman kelapa sawit, 3 (tiga) unit sepeda motor serta bahan pangan milik karyawan penghuni rumah, dibakar oleh rombongan bermotor tersebut. Menurut pemberitaan pada koran lokal Sarolangun Ekspres 22 Mei 2012, total kerugian yang diklaim perusahaan diperkirakan mencapai sekitar 5 (lima) milyar.

Tulisan ini menempatkan peristiwa konflik agraria seperti yang tersebut diatas, sebagai satu peristiwa kecil (*event*) yang menjadi tanda berlangsungnya proses perubahan besar terutama dalam konteks agraria. Suatu *event* yang menandai suatu upaya warga untuk menjadi bagian penting dari perubahan besar yang sedang berlangsung—booming permintaan minyak sawit dunia (*the struggle for better incorporation*). Konflik agraria sebagai peristiwa khusus, peluang kemunculannya tidak hanya oleh satu penyebab melainkan berada di dalam suatu konteks besar yang melingkupinya dan membuatnya mencuat, menyebar, dan bertambah. Tulisan ini tidak hendak memaparkan aneka konflik agraria ataupun menyuguhkan satu gambaran umum tentang pola-pola konflik agraria di Kab. Sarolangun.

Tidak seperti di daerah lain yang menunjukkan bahwa konflik agraria merupakan resistensi dan perlawanan atas ekspansi brutal perusahaan pertambangan-perkebunan karena dinilai mengancam tanah-tanah rakyat seperti terjadi di Bima provinsi Nusa Tenggara Barat, Pesisir Kulonprogo provinsi D.I. Yogyakarta, dan Mesuji provinsi Lampung dan Sumatera Selatan; namun apa yang terjadi di Kab. Sarolangun dalam argumen ini adalah suatu gambaran konflik yang dimotivasi oleh terbendungnya akses rakyat untuk bisa terlibat dalam aktifitas perkebunan kelapa sawit. Dengan kata lain, apa yang dibayangkan oleh rakyat dengan masuk menjadi bagian dari ekonomi perkebunan kelapa sawit adalah “*for better incorporation*”.

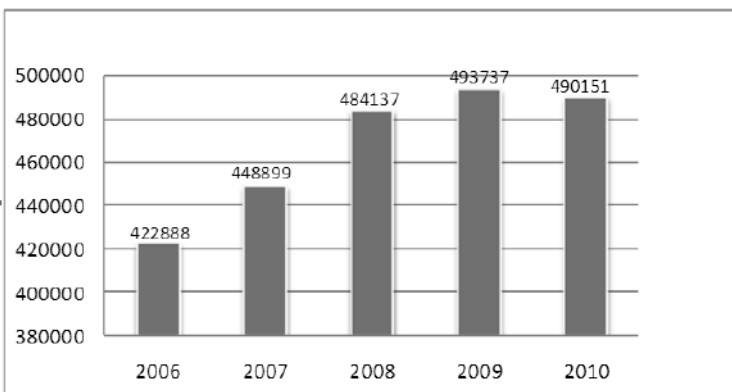
## **Ekonomi Kelapa Sawit di Jambi**

Besarnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia dalam tempo sekarang, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Komoditas ini merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan

di Indonesia yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berjalan sangat pesat. Tanah Indonesia yang ditanami sawit saat ini mencapai 10 juta hektar, dan akan berlipat dua kali dalam dekade ke depan. Sebelumnya, pada periode tahun 2004 – 2008 rata-rata pertumbuhan luas areal kelapa sawit adalah 1,719,047 ha atau dari 5,288,829 ha pada tahun 2004 menjadi 7,007,876 ha pada tahun 2008 (Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, 2009).

Perkembangan pesat lahan kelapa sawit juga terjadi di Jambi. Provinsi Jambi merupakan suatu daerah yang mempunyai pelabuhan ekspor dan merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia setelah Riau, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. Dari semula yang hanya seluas 44.763 ha pada tahun 1990 meningkat menjadi 448.899 ha di tahun 2007. Hal demikian berarti mengalami peningkatan 10-an kali lipat dalam 17 tahun. Peningkatan luas areal lahan kelapa sawit tersebut, juga menjadi indikasi dari peningkatan jumlah perusahaan industri pengolahan kelapa sawit di Jambi. Pada tahun 2007 jumlah perusahaan industri kelapa sawit sebanyak 16 perusahaan. Namun pada tahun 2009, jumlah perusahaan ini meningkat signifikan menjadi 28 perusahaan (BPS Provinsi Jambi, diolah, 2012).

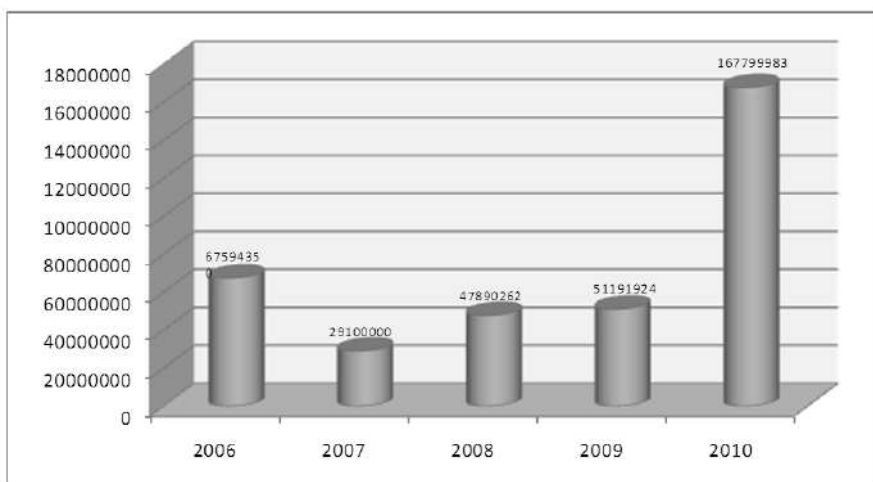
Grafik 1. Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi  
2006-2010 (dalam ha)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011

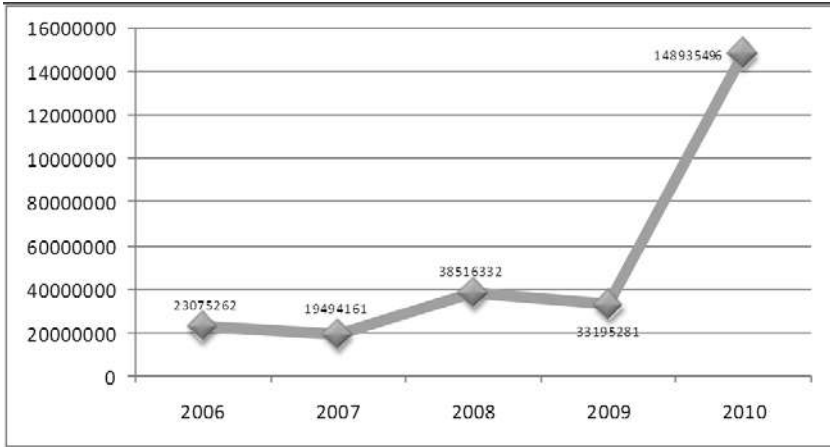
Kelapa sawit di Jambi, menghasilkan produk utama berupa TBS (Tandan Buah Segar). TBS yang digunakan untuk industri pengolahan kelapa sawit pada tahun 2006 saja sebanyak 2.854.331 ton, senilai 1,9 trilyun rupiah. Di Jambi, TBS pada industri pengolahan kelapa sawit diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit, inti atau biji kelapa sawit (*palm kerner*) dan minyak inti kelapa sawit atau Palm Kernel Oil (PKO). Tahun 2006-2010, harga CPO di Jambi berada di kisaran harga 3.100 rupiah per kg hingga 9.100 rupiah per kg. Sedangkan harga kernel pada tahun 2006-2010, berada di kisaran harga 1.500 rupiah per kg hingga 6.000 rupiah per kg. CPO dan turunannya menjadi komoditi ekspor andalan industri di Jambi. Tahun 2006-2010, ekspor CPO dari provinsi ini dikirim ke Malaysia, Belanda, India, dan Cina (BPS Provinsi Jambi, diolah, 2012). Berikut grafik volume dan nilai ekspor CPO dan Kernel Provinsi Jambi pada tahun 2006-2010.

Grafik 2. Volume Ekspor CPO 2006-2010 (dalam kg)



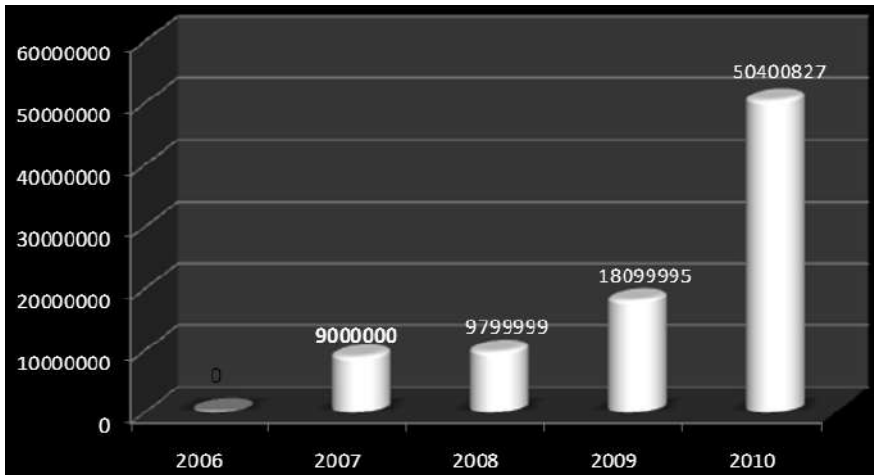
Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011

Grafik 3. Nilai Ekspor CPO 2006-2010 (dalam US dolar)



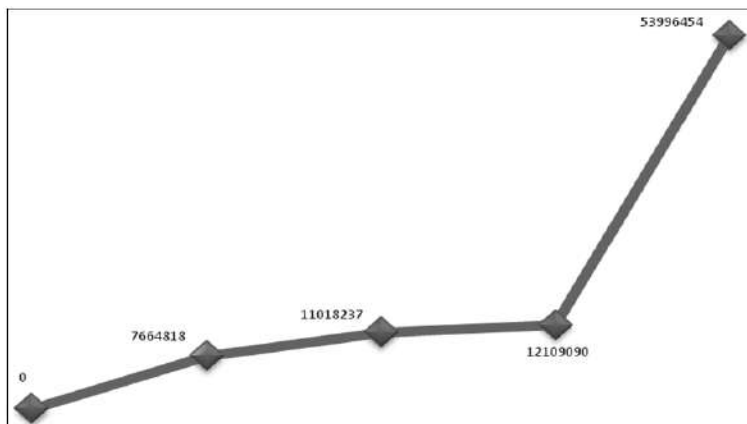
*Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011*

Grafik 4. Volume Ekspor Kernel 2006-2010 (dalam kg)



*Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011*

Grafik 5. Nilai Ekspor Kernel 2006-2010 (dalam US dolar)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011

Selain hal tersebut diatas, daya tarik kelapa sawit berdasarkan analisis finansial investasi perkebunan kelapa sawit skala besar (10.000 ha) memberikan manfaat yang diterima oleh investor lebih besar dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan, yaitu memberikan keuntungan bersih sebesar US\$ 72,62 juta dari hasil penjualan CPO dan PKO. (E. G. Togu Manurung, 2001). Oleh karena itu, maka lazim sekitar 10 juta orang secara radikal ditransformasikan oleh kedatangan jenis tanaman raksasa ini, dan jutaan orang lagi yang akan mendapat pengalaman serupa beberapa tahun kedepan. Kebutuhan tanah untuk penanaman kelapa sawit sangat luas. Namun jika hal demikian tidak diiringi dengan besarnya permintaan tenaga kerja, akan mengakibatkan surplus populasi yang tidak terserap sektor industri perkebunan. Sebab 1 ha perkebunan kelapa sawit hanya membutuhkan 5 orang tenaga kerja (di Malaysia 1:1). Populasi ini merupakan “*reserve army*” yang jika terus menerus tidak terserap sebagai tenaga kerja produktif, maka akan berpotensi menjadi “*reserve conflict*”.

Di Provinsi Jambi, kelapa sawit merupakan komoditas unggulan pada subsektor perkebunan di sektor pertanian selain karet. Kelapa sawit dan karet di Jambi menjadi komoditi yang diunggulkan dengan menggeser sektor tanaman bahan makanan yang merupakan penunjang utama dalam mencukupi kebutuhan pangan secara kualitas dan kuantitas (BPS Provinsi Jambi, Statistik Ekonomi Makro, 2009). Hingga tahun 2005, daerah ini mampu mengekspor karet sekitar 274.571 ton dengan



nilai kurang lebih Rp 2,98 triliun (Fahmi, 2007). Perkebunan karet di Jambi seperlima dari luas perkebunan karet nasional atau 600 ribu hektar lebih, dari 3,4 juta hektar perkebunan karet di Indonesia. Sebagian besar perkebunan karet tersebut adalah perkebunan karet rakyat yang menghasilkan produksi karet paling tinggi. Pada tahun 2006, produksi perkebunan karet rakyat mencapai 289.633 ton, sedangkan produksi perkebunan swasta hanya 3.020 ton. Dominannya perkebunan karet rakyat di provinsi Jambi memberikan peran krusial bagi tersedianya bahan baku industri karet di berbagai negara, terutama Amerika, Jepang, Cina, dan beberapa negara di Asia dan Eropa.

Namun, perkembangan terakhir memperlihatkan kecenderungan yang berbeda. Perkebunan karet yang semula luas itu, perlahan-lahan mulai digeser oleh tanaman sawit. Tidak hanya perusahaan-perusahaan modal besar yang membuka lahan untuk tanaman kelapa sawit tetapi warga setempat juga berbondong-bondong menanamnya. Lahan sawit yang semula berkisar 403.467 hektar pada tahun 2005, sekarang ini menjadi hampir mencapai 500.000 hektar, atau meningkat 21 persen. Pemerintah daerah Provinsi Jambi, lebih agresif memperluas perkebunan kelapa sawit terutama sejak tahun 2006. WALHI Jambi mencatat izin pengembangan perkebunan kelapa sawit di Jambi saat ini seluas 1,3 juta ha. Izin perkebunan yang telah direalisasikan seluas 513.300 ha, dan 786.700 ha sisanya lagi belum tergarap. Perluasan perkebunan sawit di Provinsi Jambi juga telah menjadi bagian dari politik anti ketahanan pangan dimana perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini menyapakan lahan pangan seluas 40 ribu ha untuk dijadikan perkebunan sawit. Para pihak yang ikut dalam konversi tata guna lahan ini bukan hanya perusahaan-perusahaan besar tetapi masyarakat juga melakukan hal serupa. Banyak perkebunan karet rakyat yang ditebang kemudian diganti dengan kelapa sawit, dengan alasan karena ekonomi sawit dipandang lebih menjanjikan keuntungan besar dibandingkan karet.

Sistem perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang bertumpu pada perusahaan perkebunan seperti yang telah terjabarkan di atas telah melahirkan banyak konflik, termasuk di Jambi. Di Jambi, ada 38 konflik yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit. Penyebab utamanya adalah pembukaan lahan perkebunan melampaui luas hak guna usaha yang diperoleh perusahaan, merambah ke lahan warga atau tanah adat tanpa izin. Konflik juga dipicu pelanggaran atas kerjasama

kemitraan. Perusahaan tidak merealisasikan sistem bagi hasil sesuai kontrak sehingga petani atau pemilik lahan merasa dirugikan. Selain itu, tidak sedikit konflik agraria yang lahir dari sistem perkebunan inti plasma karena inti dinilai melanggar kesepakatan dengan petani plasma.

Tonggak-tonggak bekas tanaman karet warga yang segera tergantikan oleh perluasan tanaman sawit



*Sumber : dokumen penelitian, 2012*

SETARA, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Jambi mencatat konflik agraria dan kekerasan di Jambi yang dirilis tahun 2011. Lembaga ini menyebutkan bahwa dalam rentang tahun 2001-2010 terdapat 70 konflik di sektor kehutanan dan perkebunan, yang sampai akhir tahun 2010 belum ada penyelesaiannya. Artinya konflik tersebut merupakan konflik laten yang bisa menjadi konflik terbuka kapan saja. Pada tahun 2011 misalnya, tercatat sekitar 44 konflik terjadi di berbagai sektor berbasis tanah dan sumber kekayaan alam, dengan luasan lahan konflik 222.688 hektar. Sebagian konflik yang muncul di tahun 2011 adalah konflik lama yang belum diselesaikan dengan tuntas. Sebagian konflik tersebut muncul berkaitan langsung dengan tanah, tetapi ada juga yang disebabkan oleh ketidakadilan kebijakan dan ketidakadilan manfaat pembangunan industri berbasis sumber-sumber agraria lainnya seperti tambang dan hutan (Setara Jambi, dkk. 2011).

## Konflik Agraria di Sarolangun

Sepanjang tahun 2011 hingga awal tahun 2012 khusus di wilayah Sarolangun paling tidak terdapat 10 konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berikut ini adalah daftar sebelas konflik agraria yang terjadi di Sarolangun semenjak dibukanya perkebunan kelapa sawit.

1. Lokasi konflik di Desa Batu Putih, Payo Lebar dan Pematang Kulim, antara PT Duta Multi Inti Palma Perkasa (PT. DIPP) dengan masyarakat pemilik lahan dan Koperasi Usaha Mandiri. Konflik ini mulai muncul pada tahun 2004 berhubungan dengan permasalahan bagi hasil dalam pola kemitraan.
2. Lokasi konflik di Desa Kasang Melintang, Pangkal Bulian, Seu Jernih, Semurung, Desa Baru, Lubuk Kepayang antara PT. Era Mitra Agro Lestari (PT. EMAL) dan PT. Indo Agroganda Lestari (PT. IAL), yang terjadi sejak tahun 2008 berkenaan dengan *overlapping* lahan perkebunan antar perusahaan.
3. Lokasi konflik di Desa Kasang Melintang, Lidung, Karang Mendapo dan Sei Pelakar antara PT. Kresna Duta Agroindo (KDA) dan Koperasi Tiga Serumpun dengan masyarakat Desa Karang Mendapo dan Batu Ampar. Konflik yang mulai muncul pada tahun 2008 ini dipicu oleh masalah produksi kebun dan bagi hasil yang dianggap tidak transparan, sehingga masyarakat dirugikan.
4. Konflik di Desa Bukit Subhan Kecamatan Air Hitam, antara PT. Sari Aditya Loka (SAL) dengan masyarakat Desa Limbur Merangin Kabupaten Merangin. Konflik yang dipicu oleh tuntutan masyarakat terhadap pembagian kebun pada tanah adat Payo Lengantuk, Desa Rawa Jaya yang diikuti dengan pendudukan kebun inti ini mulai terjadi pada tahun 2010.
5. Konflik di Desa Mentawak Baru dan Mentawak Ulu di Kecamatan Air Hitam antara PT. Jambi Agro Wijaya (PT. JAW) dengan Gapoktan Desa Baru dan Desa Lubuk Kepayang di Kecamatan Air Hitam dan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Pamenang Kabupaten Merangin. Konflik ini terjadi akibat klaim lahan seluas 3000 hektar, dan adanya pengrusakan kebun rakyat yang diduga dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2007. Konflik ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 Mei 2012, yang ditandai dengan pembakaran 62 rumah pekerja kebun dan 15 hektar perkebunan milik perusahaan.

6. Konflik di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang antara PT. Agrowiyana dengan masyarakat Desa Lubuk Resam. Konflik yang terjadi pada tahun 2007 ini diakibatkan oleh digusurnya tanah dan tanaman masyarakat yang sudah dilakukan sejak tahun 1998 karena diklaim sebagai kawasan HGU perusahaan.
7. Konflik di Desa Sarolangun antara PT. Tandan Abadi Mandiri dengan Koperasi Sungai Pagu Sawit Mandiri. Konflik ini dipicu oleh pengelolaan kebun yang tidak mengikutsertakan koperasi dan belum tercapainya kesepakatan kerjasama dan pola bagi hasil pada tahun 2011.
8. Konflik di Desa Baung dan Desa Tinting Kecamatan Sarolangun antara PT Tunas Tani Utama dengan PT. Bina Usaha Lestari yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih lahan perkebunan antar perusahaan yang muncul pada tahun 2011.
9. Konflik masyarakat Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun dengan PT. Agro Indo Lestari yang dipicu oleh adanya tuntutan kompensasi sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) yang 150 ha lahannya diambil alih oleh perusahaan. Perusahaan menganggap bahwa lahan yang disengketakan adalah lahan yang masuk wilayah HGU yang dikuasainya. Konflik ini mulai memanas pada awal tahun 2012.
10. Konflik antara PT. Agronusa Alam Sejahtera dengan masyarakat di Kecamatan Mandiangin; dan
11. Konflik antara PT. Samhutani sebagai pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri dengan masyarakat di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan berkenaan dengan penguasaan lahan.

### **Permasalahan dan Tujuan Penelitian**

Dari paparan di atas terdapat 4 (empat) fakta penting. Pertama, *booming* tanaman kelapa sawit mulai menggeser tanaman karet rakyat dan tanaman pangan lainnya. Kedua, transformasi ini ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai pendorong dan pelaku utama. Ketiga, transformasi ini membutuhkan luasan tanah yang sangat besar yang mengakibatkan konversi besar-besaran tanah sehingga mengubah tata guna lahan. Keempat, usaha pertanian rakyat baik berupa tanaman pangan atau tanaman komoditas ekspor (karet) mulai tergusur perlahan-lahan oleh sawit baik yang ditanam oleh perusahaan besar maupun

dikonversi sendiri oleh para pemilik lahan. Keempat, perubahan besar yang dibawa oleh pergantian tanaman itu melahirkan titik-titik konflik yang frekuensinya terus meningkat dan menyebar dengan beragam aktor.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil dua permasalahan penting yang ingin dijawab dalam penelitian ini yakni: (1) apa yang melatarbelakangi peristiwa pembakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. Jambi Agro Wijaya?, (2) bagaimana kaitan antara pembakaran tersebut dengan perubahan agraria di Jambi? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap konflik untuk menemukan pesan utama dibalik aksi kekerasan pembakaran yang tidak terhindarkan itu. Peristiwa pembakaran bedeng karyawan PT. Jambi Agro Wijaya di Sarolangun menjadi jendela untuk memahami apa yang mendasari aksi pembakaran warga terhadap aset perkebunan sawit tersebut.

### **Lokasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian lapang ini, dilakukan di wilayah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Studi lapangan (*field study*) dilakukan pada akhir Mei – 4 Juni 2012, dengan mempergunakan teknik penggalian data seperti observasi langsung (*direct observation*), dokumentasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Observasi langsung dilakukan di areal perusahaan dan perkebunan kelapa sawit perusahaan PT. Jambi Agro Wijaya (JAW) yang lokasinya terletak di Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, tepatnya di Desa Mentawak Baru. Wawancara mendalam dilakukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sarolangun dan jajarannya, anggota dewan legislatif Kab. Sarolangun, pemerintah daerah Sarolangun, Sekretaris Dinas Perkebunan Sarolangun, pemerintah Kec. Air Hitam, pemerintah Desa Mentawak Ulu, asisten kepala PT. JAW, karyawan PT. JAW, masyarakat dan beberapa tokoh kunci.

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi, yang menjadi penyuplai komoditas internasional kelapa sawit dan karet. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), yang menjadi sebuah wilayah kabupaten yang otonom di Jambi pada tahun 1999. Daerah Sarko mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu Kab. Sarolangun dan Kab.

Merangin. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara geografis, Kabupaten Sarolangun terletak antara 01°53'39" sampai 02°46'02" Lintang Selatan dan antara 102°03'39" sampai 103°13'17" Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 10 sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut (dpl), berbatasan dengan Kabupaten Batanghari di sebelah utara, Kabupaten Rejanglebong (Bengkulu) di bagian selatan, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Musi Rawas (Sumatera Selatan) serta berbatasan dengan Kabupaten Merangin sebagai kabupaten induk di sebelah barat.

Kabupaten Sarolangun memiliki sepuluh (10) kecamatan dengan total luas 6.174 km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Batang Asai, Limun, Cermin-Nan Gedang, Pelawan, Singkut, Sarolangun, Bathin VIII, Pauh, Air Hitam, Mandiangin. Sejumlah ± 391. 953 ha luasannya sebagai tanah budidaya untuk pemukiman, sawah, ladang/tegalan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, semak-semak/alang-alang dan belukar. Sedangkan seluas ± 225. 490 ha, diorientasikan untuk hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, taman nasional Bukit Dua Belas dan cagar alam. Memiliki akses perhubungan meliputi jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.

Sarolangun sebagai daerah pemekaran, tidak berbeda dengan daerah lainnya di Jambi, kini sedang membuka ribuan hektar lahan kelapa sawit. Pembukaan investasi pada sektor perkebunan dilakukan, antara lain dengan memberikan dan menerbitkan sertifikat Hak guna Usaha (HGU) bagi belasan perusahaan investor di Sarolangun. Total perusahaan perkebunan untuk beragam komoditas utamanya sawit yang ada di kabupaten ini ada 35 perusahaan dengan HGU ataupun IUP. Perusahaan tertua memiliki sertipikat HGU pada tahun 1992 tatkala masih dalam administrasi Kabupaten Sarolangun-Bangko. Perusahaan lain mendapatkannya pada tahun 2008-2010. Locus peristiwa pembakaran camp karyawan dan areal lahan P.T Jambi Agro Wijaya (JAW) seperti yang telah tersebut di atas, merupakan satu bagian dari induk perusahaan kelapa sawit di Sarolangun (*Bakrie Sumatra Plantations*) yang memegang HGU terluas di Sarolangun yaitu dengan luas total 22.051, 59 ha (60, 75%) dari total keseluruhan HGU di Sarolangun yang luasnya 36,248 ha (BPN Sarolangun, 2011).

Konflik agraria di Jambi dan khususnya di Sarolangun, mulai menjadi sangat massif bermunculan terutama sejak daerah ini membuka ratusan ribu hektar tanahnya untuk penanaman komoditas sawit. Daerah ini telah mengalami beberapa fase perubahan tata guna lahan. Jauh sebelum sawit masuk, masyarakat Jambi melakukan budi daya padi ladang, karet rakyat yang dikombinasikan dengan tanaman buah-buah atau tanaman untuk kerajinan seperti rotan dan bambu. Namun sejak tahun 1950-an, agroforestri karet ini mulai tergusur oleh penanaman karet monokultur dan sekarang berubah menjadi sawit (Freintrene, Chong, dan Levang; n.d).

### **Temuan dan Ulasan**

Temuan riset ini menunjukkan beberapa hal yang mengindikasikan bahwa upaya warga untuk masuk menjadi bagian dari proses perubahan agraria yang menguntungkan mendasari terjadinya *events* pembakaran sebagai titik kulminasi konflik. Temuan ini didasarkan pada beberapa temuan, pertama, Jambi secara keseluruhan termasuk Sarolangun didesain menjadi pusat penanaman komoditas ekspor kelapa sawit yang tampak dari beberapa fase perubahan tata guna lahan. Tanaman kelapa sawit dan karet sebagai sub sektor tanaman perkebunan, menjadi komoditi yang diunggulkan dan menggeser sektor tanaman bahan makanan. Sub sektor perkebunan ini memberikan kontribusi terbesar dalam sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi, yaitu sebesar 10,79 persen dari 23, 81 persen. Implikasi paling terlihat dari hal itu adalah penggabungan ke dalam sirkuit komoditas internasional menjadi pilihan yang dianggap paling rasional untuk memperoleh manfaat dari setiap perubahan tanaman komoditas. Kedua, perubahan kekuasaan pasca pemekaran tidak beriringan dengan daya kontrol atas penguasaan tanah. Hal ini membawa pada kondisi dimana ketidakjelasan penguasaan menjadi penyebab paling sering dari konflik agraria. Ketiga, perubahan agraria yang terakhir tidak diletakkan pada kekuatan rakyat seperti pada tahap perubahan pada masa-masa sebelumnya dari perladangan padi ke perkebunan karet rakyat, tetapi disandarkan kepada perusahaan perkebunan sawit sebagai aktor utama.

Tulisan ini hendak menjelaskan mengapa orang-orang membakar aset-aset perkebunan. Sebagai sebuah *events* khusus, pesan apa yang

sebenarnya hendak disampaikan oleh pelaku aksi pembakaran kepada publik dan kepada pihak yang terkena aksi pembakaran. Sebagai sebuah aksi, pembakaran mengindikasikan terjadinya kemacetan dialog dan suatu pelanggaran yang berulang-ulang yang tidak pernah terlesaikan. Konflik yang manifes menjadi aksi pembakaran di dalam konteks konflik agraria yang tersebar dan terus terjadi sejak pembukaan besar-besaran kebun kelapa sawit pada dasarnya menunjukkan gejala tertentu. Peristiwa konflik yang manifes menjadi aksi pembakaran tersebut terjadi persis pada saat tim peneliti akan turun ke lapangan.

Guna memahami apa makna pembakaran tersebut, terlebih dahulu dijelaskan konsep yang digunakan untuk menjelaskannya yaitu *diagnostic events* dan *better incorporation*. *Diagnostic events* dipakai sebagai pendekatan untuk membaca *events* konflik yang manifes pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan *better incorporation* digunakan untuk melihat alasan mengapa konflik-konflik semacam itu terjadi, meningkat, dan meluas di lokasi penelitian.

### ***Diagnostic Events***

Dalam sebuah papernya yang berjudul *Explaining the Present; Theoretical Dilemmas and Prossesual Ethnography*, Moore (1987) menjelaskan konsep *diagnostic event* sebagai sebuah perangkat analitik untuk melihat sesuatu yang besar melalui suatu peristiwa yang terjadi pada saat ini dan sekarang. Dunia dipahami sebagai satu sistem yang terintegrasi di mana komponen-komponenya saling tergantung satu sama lain sehingga suatu perubahan besar yang tengah berlangsung akan menyentuh sampai pada level terkecil dari peristiwa keseharian. Perangkat analitik ini dikembangkan dan banyak digunakan oleh etnografer yang melakukan kerja-kerja lapangan untuk memahami konstruksi budaya dan sistem sosial. Dengan cara ini seorang peneliti lapangan dapat memanen informasi sebanyak mungkin sejauh kemampuannya dari suatu peristiwa lokal yang terjadi pada saat ia berada di lapangan sebagai data-data penting yang dapat membantunya memahami persoalan yang lebih luas lagi.

Memahami sebuah peristiwa khusus atau *events* sebenarnya adalah memahami “*practice*” atau “*history*”. Sejarah dalam konteks pendekatan ini bukan masa lalu semata atau sekedar dipandang sesuatu yang terjadi



pada atau menimpa diri seseorang tetapi dimaknai—persis seperti praktik—sebagai sesuatu yang sedang dibuat, dibentuk, diwujudkan, dan diperjuangkan oleh seseorang atau masyarakat (Ortner 1984:158 dalam Moore 1987:728). Memahami melalui sebuah “*practice*” mengharuskan kita untuk melihat dari dekat, dari yang sedang terjadi, dan dari *yang benar-benar terjadi*. Dengan cara ini kita dapat terhindar dari jebakan-jebakan yang dibawa oleh term-terma besar yang bisa jadi tidak berisi seperti eksploitasi, marjinalisasi, perampasan, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan dan sebagainya. Pendekatan yang mencoba melihat sebuah praktik terjadi sesungguhnya sedang berusaha memahami sejarah yang sedang dibuat. Apa yang ingin dijelaskan oleh pendekatan ini pada dasarnya adalah hubungan antara manusia dan dunia yang lebih luas. Mengutip Sahlin (1981, 1985) dari Moore (1987: 729) “*An event is just not a happening in the world; it is relation between a certain happening and a given symbolic system. Meaning is realized ... as only events of speeches and actions. Event is empirical form of system*”. Pemahaman akan *events* sebagai “*practice*” ini berkesesuaian dengan apa yang diusulkan oleh Tania Li (2003). Menurutnya, guna mengatasi kategori/konsep “*identity*” dan “*ideology*” yang cenderung melakukan penyederhanaan secara hitam putih dalam memahami gerakan atau protes sosial, perlu dikemukakan konsep “*practices*”, “*processes*” dan “*positions*”.

Sebuah *events* dapat menunjukkan keganjilan (*dis-order*) ataupun kelaziman/kenormalan (*order*). *Events* yang menunjukkan kenormalan biasanya terkait dengan pemeliharaan tradisi atau budaya, tentang bagaimana sistem simbol yang diterima oleh seluruh anggota komunitas kebudayaan itu diejawantahkan, seperti upacara adat, ritual-ritual adat, pesta penyambutan tamu, pemberkatan orang asing yang masuk wilayah adat, dan sebagainya. Sedangkan *events* yang mengekspresikan ketidaknormalan lebih berkaitan dengan adanya hubungan yang goyah antara tatanan simbolis dengan kenyataan yang terjadi, juga bisa menunjukkan sebuah protes, atau sebuah transformasi yang tengah berlangsung secara diam-diam yang kemudian melutup menjadi *events* khusus. Seperti Moore (1987:729) simpulkan kemudian bahwa *events* sangat mungkin menjadi bukti tentang berlangsungnya sebuah pemberontakan atas struktur atau sebuah upaya yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang lain. *Events* juga dapat menunjukkan keanekaragaman kontestasi sosial atau kompetisi klaim-klaim budaya dan

juga dapat mengungkap wilayah-wilayah substansial dari ketidakjelasan-ketidakjelasan aturan normatif.

Oleh karena itu, pendekatan ini tidak memasukkan semua *events* untuk menjadi data mentah yang bisa dianalisis. *Events* yang bisa dijadikan data mentah dan yang diutamakan adalah *events* yang di dalamnya terjadi perebutan, konflik, persaingan atau upaya-upaya yang terlihat ditujukan untuk mencegah, menekan, atau melenyapkan konflik, kontestasi, dan ketegangan. Salah satu contoh yang dapat disebut sebagai “*events diagnostic*” misalnya seperti pengalihan atau pengambilalihan kekayaan tanah. Ketika di sebuah masyarakat pertanian tanah lazimnya dialihkan dari orang tua kepada anaknya terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka hal itu menunjukkan kontinuitas. Tetapi jika tiba-tiba si orang tua menjual tanah itu kepada orang lain yang bukan keluarganya dan tidak mewariskanya kepada anak-anaknya maka ini menunjukkan sedang terjadi sebuah pembelokan atau patahan dari pola yang lazim (Moore 1987:730). Dalam cara pandang ini akan dijelaskan “*event pembakaran*” dalam semesta perubahan agraria yang terjadi di Sarolangun.

### ***Better Incorporation***

Konsep *better incorporation* yang digunakan disini menyanggah asumsi konsep McCharty tentang *adverse incorporation*. Riset besar yang dilakukanya di Jambi pada tahun 2008-2009 dengan tema perkebunan sawit dan perubahan agraria di Sumatera, dengan menggunakan konsep *adverse incorporation*, menemukan bahwa perubahan agraria dalam hal kerentanan dan konflik yang muncul disebabkan oleh cara-cara yang berlainan dalam memasukkan petani ke dalam skema besar kebijakan perluasan perkebunan sawit. Dalam kasus perluasan kelapa sawit, oleh karena cara-cara yang digunakan untuk memasukkan orang-orang ke dalam ledakan perkebunan sawit itu merugikan, maka sejumlah besar pemilik tanah masih miskin, bahkan banyak yang kehilangan tanah. Ketika intensifikasi dan integrasi pertanian ke dalam pasar global meningkatkan keuntungan bagi beberapa orang, perubahan tersebut mungkin menekan yang lainnya keluar dari tanah, menciptakan kemakmuran bagi sebagian orang tetapi bersamaan dengan itu memunculkan dan melestarikan kemiskinan bagi orang lainnya (Hickey & du Toit 2007).

*Adverse incorporation* sebenarnya menyanggah konsep *exclusion* dan *inclusion* yang mengatakan bahwa kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan disebabkan karena orang tidak dimasukkan (*exclusion*) ke dalam sistem yang lebih besar. Perkebunan kelapa sawit yang dibangun besar-besaran adalah contoh dari sistem besar yang hendak memasukkan orang ke dalam sirkuitnya. Konsep *adverse incorporation* datang dengan mengatakan bahwa kemiskinan, konflik, dan sebagainya muncul bukan karena mereka berada di luar tetapi justru karena mereka masuk ke dalam sirkuit sistem yang lebih besar itulah. Konsep-konsep ini sangat kuat dalam penjelasan strukturalnya namun tidak memberikan tempat pada rasionalitas pelakunya. *Better incorporation* yang digunakan penelitian ini hendak mengatakan bahwa konflik akibat bersinggungan dengan sistem besar adalah di dorong oleh keinginan untuk menjadi bagian dari perubahan agraria yang menguntungkan.

Uraian berikut ini akan menunjukkan bagaimana kehendak untuk masuk dan memperoleh keuntungan dari perubahan agraria itu terjadi melalui pembacaan terhadap *events* konflik pembakaran perkebunan di Sarolangun.

### **Sawit Perusahaan Perkebunan yang Sarat Konflik**

Bukan hendak mengatakan bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh melulu soal penanaman sawit namun hendak menunjukkan bahwa konflik yang tersebar sekarang ini di Sarolangun adalah bagian integral dari perluasan pembangunan perkebunan sawit semenjak pemekaran daerah. Pemicunya beragam mulai dari ketidakjelasan tenurial, kontrak yang menipu, hingga pemerintah yang lemah dalam memenuhi janji dan pelayanannya. Uraian ini juga ingin menunjukkan bahwa begitu daerah ini dibawa berubah ke arah dominasi sawit di tengah produksi tanaman karet yang menurun membuat orang beramai-ramai menanam sawit dan membuka lahan baru. Itu semua berjalan di tengah ketidakmampuan pemerintah melindungi dan menjamin kepastian tenurial kecuali berpihak pada perusahaan. Semua konflik yang terjadi tidak lepas dari perjuangan untuk menjadi bagian dari perubahan agraria dan mendapatkan keuntungan darinya.

Sarolangun membuka ribuan hektar lahan untuk penanaman kelapa sawit antara lain dengan memberikan dan menerbitkan sertifikat Hak

Guna Usaha (HGU) bagi belasan perusahaan investor dengan luas areal mencapai puluhan ribu hektar. Dari semua perusahaan pemegang HGU yang paling luas adalah untuk perkebunan kelapa sawit. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa daerah ini sedang bertransformasi dari perkebunan berbasis rakyat ke perkebunan berbasis perusahaan. Perkebunan berbasis rakyat adalah perkebunan karet yang sejak lama menopang perekonomian rakyat Sarolangun. Sedangkan perkebunan berbasis perusahaan adalah perkebunan sawit yang bisa dikatakan pendatang baru di Sarolangun. Modal yang dibutuhkan karet lebih kecil dan karena itu dapat diupayakan sendiri oleh rakyat sedangkan sawit tidak demikian. Meskipun banyak warga yang beralih menanam sawit tetapi hanya mereka yang bermodal besarlah yang mampu melakukannya atau menyewakan lahannya kepada perusahaan untuk ditanami sawit dengan skema inti-plasma.

Apabila melihat data yang direkam Badan Pusat Statistik (BPS) Sarolangun kita akan tertipu ketika membandingkan antara luas perkebunan karet dan perkebunan sawit. Sampai tahun 2010, misalnya, tercatat luas tanaman karet sekitar 118, 399 ha, sedangkan sawit hanya 8725 ha. Data ini sekilas menunjukkan bahwa Sarolangun masih berpihak dan mengutamakan perkebunan rakyat yaitu karet. Akan tetapi jika kita melihat data BPN Sarolangun tahun 2012, maka luas areal HGU yang ditanami sawit luasnya sangat jauh berbeda dengan yang dicatat di BPS. Berikut ini adalah daftar sertifikat HGU di wilayah Sarolangun yang meliputi 14 perusahaan, lokasi, dan luas areal HGU-nya.

**Daftar Perusahaan, Lokasi, dan Luas HGU  
di Sarolangun Tahun 2012**

No	Nama Pemegang Hak	Lokasi	Luas	Satuan Luas
1	PT. Sari Aditya Loka (SAL)	Bukit Suban, Kec. Air Hitam	790.040	m <sup>2</sup>
2	PT. SAL	Bukit Suban, Kec. Air Hitam	315.570	m <sup>2</sup>
3	PT. SAL	Bukit Suban, Kec. Air hitam	252.700	m <sup>2</sup>
4	PT. SAL	Bukit Suban, Kec. Air Hitam	116.020	m <sup>2</sup>
5	PT. SAL	Bukit Suban, Kec. Air Hitam	1.610.180	m <sup>2</sup>
		<b>Setara dalam hektar</b>	<b>308,451</b>	<b>ha</b>
6	Pt. Kresna Duta Agroindo (KDA)	Tanjung, Kec. Bathin VIII	1.799	ha
7	PT. KDA	Tanjung, Kec. Bathin VIII	10	ha
8	PT. KDA	Tanjung, Kec. Bathin VIII	2.715	ha
9	PT. KDA	Kasang Melintang, Kec. Pauh	5.022	ha
10	PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP)	Lubuk Sepuh, Kec. Pelawan	2.143,60	ha
11	PT. Era Mitra Agro Lestari (EMAL)	Gurun tuo, Kec. Mandiangin	4.461,39	ha
12	PT. EMAL	Lubuk Kepayang, Kec. Air Hitam	6.141	ha
13	PT. Jambi Agro Wijaya (JAW)	Mentawak Baru, Kec. Air Hitam	11.419,20	ha
14	PT. Perkebunan Nusantara VI	Bukit Perangin, Kec. Mandiangin	2.228,73	ha
		<b>Total</b>	<b>36.248,371</b>	<b>ha</b>

*Sumber: diolah dari BPN Sarolangun 2012*

Tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa PT. JAW menjadi pemegang HGU terluas di Sarolangun. Perusahaan ini merupakan satu bagian dari induk perusahaan *Bakrie Sumatra Plantations* (BSP) yang terdiri dari PT. JAW dan PT. EMAL. Total lahan BSP adalah 22.051,59 ha (60,75%) dari total keseluruhan HGU di Sarolangun. Dari 14 pemegang HGU seperti yang tersebut di atas, data lapangan menunjukkan bahwa hampir kesemuanya berkonflik, sebagaimana yang telah tertuliskan pada pendahuluan. Adapun konflik pertanahan di Sarolangun, didominasi oleh dua topik, yaitu berkait perkara Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Lokasi. Konflik-konflik pertanahan yang berakar karena dua hal tersebut, selama satu setengah tahun diawal kerja BPN Sarolangun (pertengahan tahun 2003), selalu terkontrol. Namun pada dua tahun terakhir setelah terjadi pembukaan akses jalan pada tahun 2000, konflik dengan masyarakat melampaui batas. Sebagai salah satu sampelnya adalah masyarakat bertindak sendiri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi (*events* pembakaran areal JAW).

Jauh sebelum sawit masuk, masyarakat melakukan budi daya tanaman bahan makanan. Namun, fase ini kemudian bergeser menjadi pembudidayaan padi ladang, karet rakyat yang dikombinasikan dengan tanaman buah-buah atau tanaman untuk kerajinan seperti rotan dan bambu, dan selanjutnya fase inipun akhirnya tergusur oleh penanaman karet monokultur dan sekarang berubah menjadi sawit. Sektor tanaman bahan makanan yang merupakan penunjang utama dalam mencukupi kebutuhan pangan secara kualitas dan kuantitas, telah tergeser oleh sub sektor tanaman perkebunan terutama karena adanya komoditi yang diunggulkan yaitu tanaman kelapa sawit dan karet, sebagai komoditas internasional dari Sarolangun. Masyarakat menjadi bergantung terhadap komoditas internasional, yang selanjutnya membentuk pemahaman bahwa jika mereka ingin lebih baik kondisi kehidupannya maka harus ikut ke dalam arus perubahan besar agraria tersebut. Baik perusahaan yang dapat menguasai lahan dalam jumlah besar melalui HGU dan masyarakat dengan mencari celah untuk menjadi bagian dari upaya menyuplai permintaan komoditas global. Cerita tentang *events* pembakaran yang terjadi pada Mei 2012 di Sarolangun dan upaya beramai-ramai untuk membuka lahan di kawasan Hutan Sialok menunjukkan bagaimana keinginan untuk menjadi bagian dari rantai komoditas global yang menguntungkan itu bekerja.

## **Dari Aksi Pembakaran Hingga Membabati Hutan Sialok**

Membaca sebuah *events* yang terbatas tidak cukup memadai untuk menemukan konteks mengapa dan dalam kondisi apa sebuah *events* muncul. Seperti Moore (1987) kemukakan di atas, membaca sebuah *events* berarti juga harus mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa lainnya yang sekilas tidak terkait, mencatat juga apa yang dikatakan oleh orang-orang lain tentang *events* tersebut. Di tengah konflik yang memanas tidak mudah bagi tim untuk menggali informasi yang mendalam. Untuk menunjukkan bagaimana perjuangan untuk menjadi bagian dari perubahan agraria yang menguntungkan itu dilakukan, dua uraian berikut ini menggambarkan konflik yang manifes dan upaya-upaya warga untuk mendapat lahan tanam baru yang lebih luas meskipun tidak dilindungi oleh kepastian tenurial.

### **(1) Pembakaran Perkebunan PT. JAW**

#### **Profil Perusahaan**

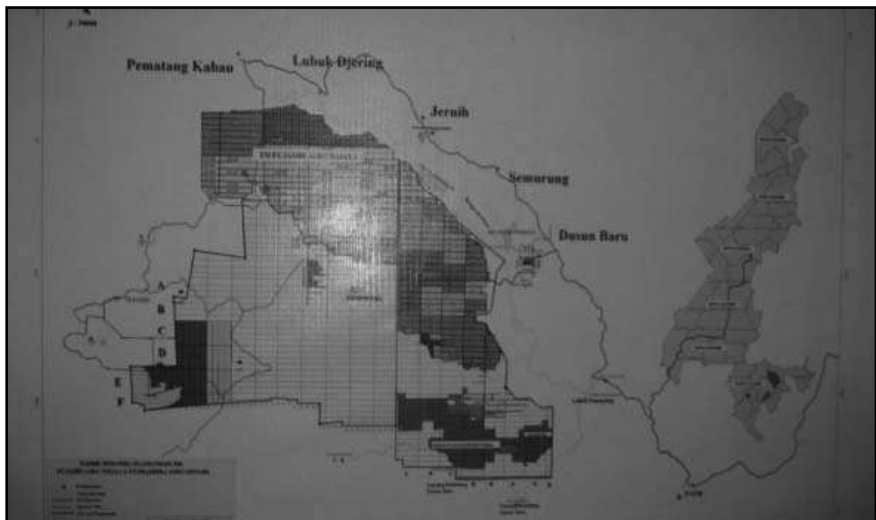
PT. JAW merupakan satu perusahaan bagian dari *Bakrie Sumatra Plantations* (BSP) selain PT. EMAL. Perusahaan ini, berada di wilayah Kec. Air Hitam, Sarolangun. Kecamatan Air Hitam terdiri dari 9 desa, 5 desa asli yaitu Lubuk Kepayang, Desa Baru, Semurung, Jernih dan Pematang Kabau, dan 4 desa transmigran yaitu Bukit Suban, Lubuk Jernih, Mentawak Baru dan Mentawak Ulu. Areal perusahaan ini, terbagi kedalam dua bagian utama yaitu areal produksi dan areal pengembangan. Kawasan PT. JAW yang berada di Mentawak Baru adalah areal lahan produksi, sedang areal dimana pembakaran terjadi, adalah areal perkebunan untuk pengembangan, yang lokasi tepatnya terletak di daerah Mentawak Ulu.

Kantor PT. JAW yang merupakan bagian dari Bakrie Sumatra Plantations



*Sumber : dokumen penelitian, 2012*

Peta Areal Perkebunan Kelapa Sawit Bakrie Sumatra Plantations dalam Peta Luasan Desa



*Sumber : dokumen penelitian, 2012*



Perusahaan ini, dalam manajemen internalnya menggunakan nama Departemen JAW atau JAW *Estate*. Di dalam lokasi areal perusahaan yang luasnya ribuan hektar ini, terdapat fasilitas internal yang cukup representif untuk disebut sebagai satu wilayah komunitas hidup mandiri seperti tempat beribadah (Masjid), lapangan, klinik berobat dan juga beberapa SPD (Satuan Pemukiman Delta). Istilah SPD ini merupakan suatu areal tempat bermukimnya beberapa anggota keluarga karyawan dalam bangunan-bangunan perumahan panggung dari kayu yang didirikan oleh perusahaan. SPD ini terdiri dari beberapa unit, dimana satu unit terdiri dari beberapa divisi. Sebagai contoh, bangunan rumah-rumah panggung di dekat areal kantor Departemen JAW, adalah divisi 3, yang terdiri dari 8 bangunan rumah. Masing-masing rumah dihuni oleh satu atau beberapa anggota keluarga lengkap yang merupakan tenaga kerja dari PT. JAW.

Parit Gajah (Pembatas) di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. JAW



*Sumber : dokumen penelitian, 2012*

Tenaga kerja pada perusahaan ini melibatkan orang-orang sekitar namun lebih banyak berasal dari luar daerah/luar provinsi. Mengingat pendidikan penduduk lokal yang relatif rendah, mereka pada umumnya dipekerjakan menjadi tenaga harian. Konsentrasi PT. JAW adalah pada

produksi bahan mentah minyak kelapa sawit dengan hasil produksi sejumlah 3-4 ribu ton/bulan. Hasil produksi yang berupa bahan mentah, dibawa ke Pematang Kulim (PT. EMAL) untuk diolah menjadi CPO dan selanjutnya dipasarkan.

### **Kronologi Pembakaran Perkebunan PT. JAW**

Sejak 29 Oktober 2007, masyarakat mengklaim memiliki lahan di lokasi HGU PT. JAW (lokasi di daerah Desa Mentawak Baru dan Desa Mentawak Ulu) seluas  $\pm\pm$  3.000 ha untuk 462 kepala keluarga. Pihak masyarakat terwakili oleh Gapoktan Desa Baru, Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Sarolangun, dan Desa Pangkal Bulian, Desa Kasang Melintang Ke. Pauh, Sarolangun; dan Kelompok Tani Mekar Jaya (KTMJ) mayoritas warga Desa Pamenang Kab. Merangin. Masyarakat mengklaim kebun milik masyarakat dirusak dan digusur PT. JAW, sedangkan PT. JAW mengklaim bahwa Gapoktan dan KTMJ hanya merupakan penggarap liar di HGU. Atas konflik ini, pemerintah Kab. Sarolangun memanggil PT. JAW dan KTMJ.

Upaya masyarakat dengan penyerahan surat kepada pemerintah setempat yang tidak menghasilkan solusi pemulihan atas hak-hak dasar mereka atas tanah haknya, menjadikan mereka melakukan demonstrasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sarolangun pada 15 Desember 2010, menghasilkan dilakukannya pengecekan oleh tim sengketa pertanahan/ lahan Kab. Sarolangun yang terdiri dari pihak legislatif daerah, kepolisian dan TNI setempat pada 28 Januari 2011 dengan hasil sebagai berikut : 1) Lokasi yang diklaim masyarakat berada di wilayah Desa Mentawak Baru dan Mentawak Ulu seluas  $\pm$  2000 ha dengan anggota kelompok tani  $\pm$  462 KK; 2) Lokasi yang diklaim berada dalam HGU perusahaan (PT. JAW); 3) Di lokasi yang dicek terdapat tanaman karet dan kelapa sawit milik masyarakat, sebagian telah produksi. Terdapat tanaman sawit yang mati dan menurut masyarakat ada indikasi diracun PT. JAW; 4) Lokasi yang dicek sebagian besar gambut; 5) Masyarakat yang hadir sebagian besar warga Desa Pamenang Kab. Merangin. Jarak tempat tinggal warga yang mengklaim relatif jauh dari lokasi yang diklaim (melewati beberapa desa).

Hasil pengecekan tersebut di atas, berlanjut pada dibuatnya draf hasil pertemuan di rumah dinas Bupati Sarolangun yang melibatkan

DPD RI yang berisi sebagai berikut: 1) HGU perusahaan (PT. JAW / PT. EMAL) akan diukur ulang, biaya ukur ulang akan diupayakan dari Pemerintah oleh DPD RI; 2) Apabila lahan tersebut melebihi dari luasan HGU perusahaan, lahan yang lebih tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat; 3) Lahan yang telah digarap oleh masyarakat di lahan HGU perusahaan ditawarkan 2 (dua) opsi yaitu di inclave dari HGU atau dimitrakan kepada masyarakat; dan 4) Apabila di dalam HGU terdapat perkampungan yang dihuni masyarakat akan dikeluarkan dari HGU. Namun sayang sekali, draf tersebut sebatas draf hasil pertemuan tanpa ditandatangani dan realisasi. Maka dari hal ini, jelas perjuangan rakyat selama beberapa tahun belum menuai hasil.

Hal tersebut serupa dengan hasil upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Sarolangun dalam menanggapi dan mengatasi konflik tersebut. Pada 9 Agustus 2011, mediasi yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan Sarolangun dengan menghadirkan Humas PT. JAW, membuahakan keterangan dan pernyataan sebagai berikut : a) Bidang tanah yang di inclave adalah milik masyarakat; 2) Ada bidang tanah masyarakat yang ditanam masyarakat tahun tanam 1998 seluas 3 ha; 3) Tanaman karet masyarakat seluas ± 20 ha di dalam areal HGU; 4) telah terjadi jual beli di dalam areal HGU seluas ± 16 ha oleh oknum masyarakat; 5) PT. JAW pada tahun 2005 memberikan ganti rugi keterlanjuran masyarakat menebang di areal HGU dengan pembayaran emas tumbang kepada 20 KK. Upaya mediasi tersebut berlanjut dengan menghadirkan unsur masyarakat untuk memberikan keterangan/penjelasan pada 13 Desember 2011, dengan inti isi antara lain bahwa tidak pernah ada sosialisasi HGU PT. JAW pada masyarakat, dan masyarakat telah menanam karet sejak tahun 1986; dan berlanjut kembali dengan pengadaan pertemuan penyelesaian permasalahan tersebut pada tanggal 9 Februari 2012 oleh pemerintah Kab. Sarolangun yang dihadiri oleh unsur dari pihak masyarakat (Gapoktan) dan pemerintahan Sarolangun (Setda Kab. Sarolangun, Dinas Bunhut, dan Kantor Pertanahan Sarolangun), namun tidak dihadiri pihak dari PT. JAW (hanya konfirmasi melalui surat tanpa nomor dan tanggal).

Berbagai upaya penyelesaian dengan pengadaan pertemuan-pertemuan tersebut di atas, maupun upaya mediasi dengan mediator dari pihak Bupati Sarolangun maupun Kantor Pertanahan Sarolangun sebagaimana yang telah tersebut di atas, tidak membuahakan solusi real

yang menyelesaikan permasalahan. Maka menjadi sangat lazim, jika dialog telah mengalami kemancetan, aksi pembakaran areal perkebunan perusahaan menjadi pilihan masyarakat untuk segera merealisasikan keinginannya untuk berkuasa atas tanah perkebunan kelapa sawit mereka, sehingga menjadi nyata keinginan untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi sawit.

Pembakaran areal perusahaan PT. JAW yang terjadi pada 20 Mei 2012 berada di areal perkebunan pengembangan. Puluhan masa dengan amarah meluap-luap membakar pemukiman karyawan PT. JAW. Tidak seorang karyawanpun yang bisa menyelamatkan barang-barang mereka dari dalam rumah. Mereka semua lari tunggang langgang menyelamatkan diri masing-masing. Satpam PT. JAW yang saat itu sedang berjaga di lokasi kejadian tidak berhasil membendung kemarahan warga. Dalam jumlah yang lebih sedikit mereka berhitung tidak akan mampu mencegah aksi massa tersebut. Tidak ada korban jiwa. Namun ketakutan membayangi para karyawan PT. JAW secara keseluruhan.

### **Lokasi Pembakaran Kamp PT. Jambi Agro Wijaya**



*Sumber : Sarolangun Ekspres, 22 Mei 2012*

Bagi pihak perusahaan dan aparat pemerintah setempat kejadian tersebut dianggap murni aksi kriminal dan harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Mereka menilai kelompok yang melakukan penyerangan dan aksi anarkis tersebut bukan warga Sarolangun melainkan

orang-orang dari kabupaten lainnya (Merangin). Aksi destruktif tersebut telah merusak 15 hektar areal tanaman kelapa sawit. Enam anggota Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang diduga terlibat pembakaran itu kemudian ditahan pihak Polda Jambi (5 warga Pamenang, Kab. Merangin, 1 warga Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun). Mereka ditangkap Buser Polda Jambi dan langsung dibawa ke Polda Jambi. Penangkapan 6 pelaku pembakaran dilakukan oleh sejumlah orang berpakaian preman dengan menggunakan mobil pribadi, membawa senjata laras panjang, dan mengaku dari Polda Jambi.

Kepemilikan perusahaan adalah berdasarkan peta perusahaan dimana batas areal perusahaan pada umumnya adalah berupa parit-parit gajah. PT. JAW bagian pengembangan mulai beroperasi tahun 2008 dengan pembukaan lahan secara pelan-pelan. Salah satu sumber menyebutkan bahwa tidak seluruh areal tanah HGU ditanami serentak pada tahap awal pembangunan perkebunan melainkan ditanami secara bertahap. Bagian areal yang belum ditanami dibiarkan begitu saja sehingga nampak seperti tanah yang “terlantar”. Ada kemungkinan areal lahan yang belum tertanami itu kemudian dimanfaatkan oleh warga dengan cara dibersihkan dan ditanami sawit. Ketika tahap penanaman perkebunan mulai berkembang ke bagian areal yang belum tertanami tersebut ternyata di areal itu sudah ada tanaman yang ditanam oleh warga. Sementara di sisi lain warga menganggap bahwa tanah yang ditanaminya itu adalah tanah bebas yang kemudian mereka manfaatkan. Dari sinilah konflik antara warga dengan perusahaan mulai muncul.

Karena perusahaan merasa bahwa areal yang ditanami sawit oleh warga itu masih dalam peta HGU-nya, maka secara sepihak alat-alat berat perusahaan merusak sawit yang ditanam warga. Atas peristiwa ini warga mengadukannya kepada pihak berwajib namun tidak ada tanggapan yang memuaskan. Kemudian peristiwanya berulang-ulang di mana tanaman sawit warga itu terus dibuldoser oleh perusahaan atau dimatikan dengan cara disemprot cairan beracun untuk mematikan tanaman. Sementara itu aduan warga kepada pihak berwajib atas tindakan perusahaan tersebut tidak mendapat respon apapun dari perusahaan.

Memang terdapat informasi dari perusahaan bahwa perusahaan telah memberikan ganti rugi kepada warga atas tanaman sawit warga yang dimatikan itu dan perusahaan tetap bersikukuh atas kepemilikan tanah yang ditanami sawit itu sebagai bagian dari peta HGU-nya. Tetapi bagi

warga cara perusahaan ini tetap dianggap meremehkan karena persoalannya bukan hanya terletak pada ganti rugi semata tetapi hak atas tanah yang ditanami sawit oleh warga itu. Mereka terus bersikukuh bahwa tanah itu adalah tanah mereka dengan bukti-bukti kuitansi pembayaran pembelian satu bidang tanah. Meskipun perusahaan mengklaim haknya tetapi dalam beberapa kasus ternyata perusahaan enggan untuk melakukan ukur ulang atas luasan HGU-nya ketika diminta untuk itu.

## (2) **Ramai-ramai Membuka Hutan Sialok \***

Peristiwa kedua ini lokasinya berbeda dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini adalah contoh yang diberikan oleh orang-orang yang ditemui tim ketika menjelaskan mengapa banyak konflik terjadi termasuk peristiwa pembakaran pada *events* yang pertama.

Seseorang warga pendatang bernama Nyamin yang berhasil kami wawancarai menceritakan proses pembukaan hutan Sialok. Ia membuka kawasan hutan Sialok yang berlokasi di Mandiangin, Jambi, ini sudah cukup lama, seingatnya sejak sekitar tahun 1992. Tetapi kawasan yang dibukanya sekitar 8 hektar itu sudah dijual dengan harga 10 juta padahal sudah ada tanaman di atasnya. Sekarang ia membuka lagi lahan di hutan Sialok itu dan sudah ditanami karet sekitar berumur 3 tahun. Akan tetapi usahanya kandas sebab tanamannya dibuldoser perusahaan, PT. Wanakasia yang akan menggantinya dengan tanaman Akasia. Ada beberapa

---

\* Pasca penelitian lapangan, konflik yang terjadi di Sialok ini semakin berekskalasi hingga terjadi pembakaran. Tim tidak mengikuti lagi perkembangan lapangan. Diberitakan pada pagi hari, 29 Agustus 2012, terjadi pembakaran terhadap aset PT Anugerah Alam Sejahtera (AAS), Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun yang menjadi amukan warga dari tujuh desa. Kamp perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Akasia ini dibumihanguskan 300-an warga. Perusahaan mengaku mengalami kerugian lebih dari Rp 5 miliar, meliputi terbakarnya empat blok basecamp 24 pintu, satu unit kantor, empat unit alat berat, satu unit trailer, dua unit truck, dua unit mobil, dua unit sepeda motor, gudang pupuk, tangki BBM berisi solar, dan fasilitas pembibitan. Dari informasi yang berkembang, motif utamanya adalah sengketa lahan. Warga mengaku telah menggarap 3.000-an hektare lahan yang kemudian diklaim sebagai HGU perusahaan yang mencapai 3.480 hektare. Perusahaan berseikukuh bahwa keberadaan mereka berdasarkan SK Menteri Kehutanan yang member penguasaan mereka selama 60 tahun. (Jambi Independent, Kamis, 30 Agustus 2012; Metro Jambi, 30 Agustus 2012).

perusahaan dengan penguasaan HGU-nya melakukan penanaman akasia. Salah satunya lagi adalah PT Anugerah Alam Sejahtera (AAS). Menurut Nyamin, petani karet ini, perusahaan tersebut adalah perusahaan kedua setelah sebelumnya ada perusahaan yang mengambil kayu. Perusahaan pengambil kayu yang pertama juga pernah mengalami konflik dengan warga yang juga mengambil kayu di situ.

Pembuldoieran tanaman orang-orang pembuka kawasan Sialok menurutnya tidak hanya terjadi kali ini saja. Peristiwa ini adalah kejadian kedua. Setelah kejadian yang pertama, sebenarnya sudah diadakan pertemuan dengan Kapolsek, pihak perusahaan, dan warga. Di dalam pertemuan itu Kapolsek mengatakan pada pihak perusahaan bahwa perusahaan seharusnya menggarap lahan yang menjadi haknya dan tidak merusak tanaman masyarakat pembuka kawasan hutan Sialok. Perusahaan sudah mendapat hak penggarapan ribuan hektar sedangkan yang digarap warga pembuka kawasan Sialok paling-paling maksimal 10 hektar. Tetapi pihak perusahaan berpegangan pada konsesi izin penanaman akasia yang, katanya, mencapai 25 ribu hektar. Setelah pertemuan itu pihak perusahaan bersedia menandatangani kesepakatan untuk tidak merusak tanaman warga pembuka kawasan Sialok.

Dulu, ketika perusahaan ini belum hadir, dan kawasan itu masih di bawah penguasaan perusahaan penebang kayu, ia pernah mendengar bahwa membuka kebun di lokasi tersebut boleh-boleh saja asalkan tidak mengambil kayunya karena kepentingan perusahaan hanya mengambil kayu. Inilah, salah satu alasan, yang meyakinkan baginya dan orang-orang lainnya untuk membuka kebun di lokasi itu. Kini banyak sekali orang yang membuka kebun di lokasi itu yang menurut perhitungan mencapai sekitar 300-an orang. Tetapi kini beberapa tanaman kebun orang-orang pembuka kawasan Hutan Sialok dibuldoier perusahaan. Menurut Nyamin, sebenarnya pembuldoieran itu, bukan murni perintah dari manajer perusahaan melainkan dilakukan oleh preman-preman perkebunan sewaan perusahaan.

Sampai sejauh ini belum ada tindakan apapun dari warga pembuka kawasan hutan Sialok itu terhadap pembuldoieran tanaman mereka. Mereka saat ini sudah sangat geram dengan ulah perusahaan tersebut. Salah seorang yang tanamannya terkena pembuldoieran mengatakan bahwa ia sudah sangat siap untuk melakukan pembakaran alat-alat berat perusahaan asalkan rekan-rekannya yang lain kompak. Ia menilai

bahwa tindakan perusahaan itu sudah sangat keterlaluan. Keberatan atas tindakan perusahaan tersebut bukan karena perusahaan telah melanggar klaim atau kesepakatan tetapi lebih karena warga tidak mau jika mereka dipindahkan ke lokasi hutan yang lebih jauh. Sementara modal mereka untuk membuka kawasan hutan sudah menipis. Pada dasarnya, warga pembuka kawasan Sialok itu sadar bahwa klaim mereka atas tanah yang sekarang mereka buka sangat lemah dan sewaktu-waktu dapat tergusur tetapi tetap saja mereka memperluas pembukaanya.

Tetapi Nyamin sendiri, salah satu korban pembulldoseraan, tidak seperti rekanya itu, ia tidak serta merta akan membalas tindakan perusahaan dengan pembakaran. Ia mengatakan bahwa biasanya yang paling berani melakukannya adalah orang asli, yaitu warga Mandiangin. “kalau kita kan hanya menumpang pada mereka”, ujarnya. Orang-orang yang ikut serta membuka kawasan hutan Sialok ini bermacam-macam. Perangkat desa juga ikut serta di dalamnya, bahkan menurut Nyamin seorang anggota Babinsa juga membeli beberapa bidang tanah di sana. Selain itu, bahkan orang-orang yang pada dasarnya sudah memiliki tanah luas di desanya sendiri pun ikut ambil bagian di kawasan hutan itu. Tanah memang barang yang menggiurkan bagi siapapun juga.

Yakub, yang disebut ‘datuk’, sebenarnya adalah orang yang memegang informasi kunci atas status kawasan hutan itu. Ia bahkan mendapat salinan keputusan menteri kehutanan tentang penetapan cadangan hutan tanaman rakyat yang lampiran petanya tidak ada. Sehingga tidak dapat dipastikan kawasan mana yang ditetapkan sebagai hutan rakyat itu. Salinan keputusan itulah yang saat ini dijadikan dasar oleh warga untuk memperkuat legitimasi mereka atas tanah Sialok yang sudah mereka buka. Mereka telah membayar 500 ribu kepada Yakub sebagai uang pembayaran pembukaan akses jalan ke hutan tersebut yang, katanya, awalnya dilakukan oleh Yakub. Beberapa orang menilai bahwa ia memanfaatkan situasi ketidakpastian ini dan memanfaatkan pula ketidaktahuan warga. Kini, kasus pembulldoseraan tanaman warga itu tengah diajukan ke kabupaten dan menunggu bupati menyelesaikannya. Tetapi penyelesaian itu, katanya, masih menunggu bupati menyelesaikan tanah di KM 15 yang terjadi sengketa antara perusahaan dengan warga sekitar.

Surat keputusan menteri kehutanan MS. Kaban yang diedarkan kepada warga sekitar hutan adalah SK yang ditandatangani pada tahun



2008 tentang Pencadangan Areal Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas ± 18.840 Hektar di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Tetapi surat yang seharusnya dilampiri peta itu tidak ada lagi petanya. Awalnya bupati Sarolangun, yang kini menjadi gubernur Jambi, pada 2008 mengusulkan tanah seluas ± 27.700 Ha untuk Hutan Tanaman Rakyat, tetapi melalui telaah badan planologi diturunkan jumlahnya menjadi ± 18.840 Ha. Namun, SK tersebut tidak menyebutkan dengan jelas di mana lokasi yang sebenarnya. Tampaknya lokasi yang sebenarnya diserahkan penetapannya kepada bupati tetapi tidak ada surat keputusan bupati yang menetapkan kawasan Sialok sebagai lokasi HTR. Kawasan hutan Sialok yang sekarang banyak dibuka oleh warga, jika tidak ditangani sejak awal, akan menjadi titik konflik di masa depan seperti konflik warga dengan PT. JAW di atas. Sawit sedang *booming*, semua orang ingin punya lahan luas, dan semua orang ingin tanam sawit dan karet, dan semua ingin masuk dan menjadi bagian yang menguntungkan dari rantai ekonomi komoditas global tersebut.

## Penutup

Pemandangan perubahan penanaman dari semula karet menjadi sawit di sepanjang jalan di Sarolangun pada mulanya mengherankan tim peneliti. Rakyat tidak memusuhi sawit dan mempertahankan karet yang kami anggap telah terintegrasi menjadi bagian dari budaya dan ekonomi rumah tangga mereka. Pengelolaan sawit yang tidak seintensif karet—terlebih tenaga kerja muda lebih memilih ke luar kota—dan sawit bisa menjadi andalan sewaktu-waktu rumah tangga membutuhkan uang disertai harganya yang tinggi, menjadi pertimbangan utama mereka.

Aksi pembakaran yang dilakukan oleh warga baik yang dari Sarolangun maupun Merangin yang dinamai sebagai sekelompok massa Gapoktan itu mencerminkan tuntutan warga atas klaim 3000-an hektar tanah yang masuk dalam kawasan HGU perusahaan. Mereka merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka. Pembakaran bukan mencerminkan sikap anti sawit, namun yang terjadi adalah sebaliknya, keinginan untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi sawit. Kenyataan bahwa rakyat menanam 3000-an hektar tanah dengan sawit yang berujung pembuldoseran dan diracunnya tanaman oleh perusahaan itu, cukup menjadi bukti bahwa sawit bagi mereka adalah pencipta kesejahteraan

(*for better incorporation*), bukan pencipta kemiskinan. Namun demikian, yang mereka tuntut lebih lanjut adalah skala pengelolaan sawit yang ada di kendali mereka, dan bukan penanaman sawit dalam skala perusahaan yang hanya akan menempatkan mereka sebagai pihak luar dengan celah kecil pelibatan sebagai tenaga kerja/buruh upahan. Bagi mereka, kondisi terakhir ini hanya akan menjadikan perusahaan perkebunan sawit sebagai pencipta kemiskinan (*adverse incorporation*).

## Daftar Pustaka

- Arif, B. Fajar. 2001. *Data Ekspor Komoditas Karet, Tebu, Teh, dan Kelapa sawit Indonesia*. Diunduh dari repository.mb.ipb.ac.id/868/4/17B-04-Fajar-pendahuluan.pdf pada 13 Maret 2012.
- Aula Sakinah Muntasyarah. 2006. *Agroforest karet di Jambi: dapatkah bertahan di era desentralisasi?*. Bogor: CIFOR.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2011. *Ringkasan Eksekutif. Industri Kelapa Sawit Provinsi Jambi 2006-2010*. Jambi : BPS Provinsi Jambi.
- , 2010. *Ringkasan Eksekutif. Industri Karet Remah Provinsi Jambi 205-2009*. Jambi : BPS Provinsi Jambi.
- , 2009. *Ringkasan Eksekutif. Statistik Ekonomi Makro Provinsi Jambi 2008-2009*. Jambi : BPS Provinsi Jambi.
- Badan Pusat Statistik Sarolangun. 2011. *Statistik Daerah Kabupaten Sarolangun 2011*. Sarolangun : BPS Sarolangun.
- Beria Leimona, *at.all*. 2010. *Improving smallholders' rubber quality in Lubuk Beringin, Bungo district, Jambi province, Indonesia; An initial analysis of the financial and social benefits*. Bogor :ICRAF Southeast Asia.
- BirkaWicke, Richard Sikkema, Veronika Dornburg, André Faaij. 2010. *Exploring land use changes and the role of palm oil production in Indonesia and Malaysia*. Land Use Policy 28 (2011) 193–206.
- Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan. 2009. *Unggulan Pertanian Indonesia Untuk Dunia*.

- Dr. Ir. Didiek, H Goenadi, M.Sc., dkk. 2005. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit Di Indonesia*. Tim Tanaman Perkebunan Besar. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
- Harry Suharno. 2011. *Ketika Rakyat Jambi Kembali Menuai Dolar Putih dan Emas Hijau*. Diunduh dari <http://jambi.tribunnews.com/2011/12/24/ketika-rakyat-jambi-kembali-menuai-dolar-putih-dan-emas-hijau-> (6 April 2012).
- Julia and Ben White. 2011. The gendered politics of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan, Indonesia. International Conference on Global Land Grabbing Institute of Development Studies, University of Sussex 6-8 April 2011.
- Laurène Feintrenie , Wan Kian Chong , Patrice Levang. 2010. Why do farmers prefer oil palm? Lessons learnt from Bungo district, Indonesia. CIFOR: Bogor.
- Laurène Feintrenie and Patrice Levang. N.d. Sumatra's Rubber Agroforests; Advent, Rise and Fall of a Sustainable Cropping System. CIFOR: Bogor.
- Li, Tania, Situating Resource Struggles, Concepts for Empirical Analysis, Economic and Political Weekly, November 29, 2003
- Lucy Rist, Laure `ne Feintrenie, Patrice Levang. 2010. *The livelihood impacts of oil palm: smallholders in Indonesia*. Biodivers Conserv (2010) 19:1009–1024.
- Manurung, E. G. Togu . September 2001. *Analisis Valuasi Ekonomi Investasi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*. Jakarta :EPI.
- Marti, Serge. 2008. Losing Ground; The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia. LifeMosaic, Sawit Watch, Friends of the Earth.
- McCarthy, John F.2010. 'Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia', Journal of Peasant Studies, 37: 4, 821 — 850.
- Moore,Sally Falk. 1987. Explaining the Present: Theoretical Dilemmas in Processual Ethnography, *American Ethnologist*, Vol. 14, No. 4. (Nov., 1987), pp. 727-736.

- Nur Endardi Sudibjo. 1999. *Kajian Agroforestry Karet dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Rumah Tangga ; Studi kasus di Desa Sepunggur, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi*. Bogor :ICRAF Southeast Asia.
- Papenfus, Michael M. 2000. *Investing in Oil Palm: An Analysis of Independent Smallholder Oil Palm Adoption in Sumatra, Indonesia*. Bogor :ICRAF Southeast Asia.
- Radar Sarko. “Buser Polda Ringkus 5 Warga Pamenang”. 31 Mei 2012  
-----, “BPN Mengaku Kesulitan Terima Rekomendasi Untuk Pengukuran Lahan Sengketa Gapoktan dan PT. JAW”. 31 Mei 2012.
- Sam Hickey and Andries du Toit. 2007. Adverse incorporation, social exclusion and chronic poverty. CPRC Working Paper 81. Institute for Development Policy and Management School of Environment and Development University of Manchester: United Kingdom.
- Sarolangun Ekspres. “Bupati Prihatin Pembakaran Camp JAW”. 22 Mei 2012.  
-----, “ Polres Pertemukan Perusahaan dan Warga”. 24 Mei 2012.  
-----, “Polsek Perketat Pengamanan di PT JAW”. 29 Mei 2012.  
-----, “ Merebak Isu Warga Demo Polres “. 1 Juni 2012.  
-----, “ Warga Pamenang Datangi Mapolres” . 1 Juni 2012.
- Saturnino M. Borrás Jr and Jennifer C. Franco. Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis. *Journal of Agrarian Change*, Vol. 12 No. 1, January 2012, pp. 34–59.
- Silaluho, Martua dkk. Agustus 2007. *Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria*. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*.
- WR SUSILA. *Agribisnis Perkebunan Memasuki Awal Abad 21* ejournal. [unud.ac.id/.../5\)%20soca-su-dra-agribisnis%20perkebunan](http://unud.ac.id/.../5)%20soca-su-dra-agribisnis%20perkebunan). Diunduh pada 13 Maret 2012.
- [www.perhepi.org/images/stories/publikasi/buku\\_perhepi/husein.pdf](http://www.perhepi.org/images/stories/publikasi/buku_perhepi/husein.pdf). *Akses Pasar Produk Pertanian WTO-Perhepi*. Diunduh pada 13 Maret 2012.